

2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501) ;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165) ;
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;

8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 1993 tentang Rencana Tata Ruang Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah ;
9. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Propinsi Kalimantan Tengah

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI KALIMANTAN TENGAH.

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI
KALIMANTAN TENGAH TENTANG
POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH
PROPINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2001 – 2005**

Pasal 1

Pola Dasar Pembangunan Daerah adalah Dokumen Induk Perencanaan Pembangunan di Daerah Propinsi Kalimantan Tengah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah.

Pasal 2

- (1) Kedudukan Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai kerangka Perencanaan Pembangunan Daerah yang merupakan penjabaran kehendak masyarakat Daerah Kalimantan Tengah dengan memperhatikan arahan dan Garis-garis Besar Haluan Negara 1999.
- (2) Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah berfungsi sebagai landasan penyusunan Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah serta sebagai pedoman penyusunan perencanaan pembangunan bagi seluruh Aparatur Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di Daerah Propinsi Kalimantan Tengah.

Pasal 3

- (1) Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah disusun untuk masa lima tahun kedepan.
- (2) Pola Dasar Pembangunan Daerah dimaksud pada ayat (1), disusun dengan sistematika sebagai berikut:

| | |
|----------------|---|
| BAB I | PENDAHULUAN |
| BAB II | KONDISI DAN POTENSI DAERAH |
| BAB III | VISI, MISI DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH |
| BAB IV | ARAH KEBIJAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| BAB V | KAIDAH PELAKSANAAN |
| BAB VI | PENUTUP |

Pasal 4

Isi beserta uraian perincian tersebut dalam Pasal 3 terdapat dalam naskah Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah yang merupakan Lampiran dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Berdasarkan Peraturan Daerah ini disusun Program Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah, Rencana Pembangunan Tahunan Daerah dan selanjutnya setiap tahun disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Tahun 1994/1995-1998/1999 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Tengah.

Disahkan di Palangka Raya
pada tanggal 2 Agustus 2001

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,




ASMAWI AGANI

**Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal**



**SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
KALIMANTAN TENGAH,**



**Drs. A. Dj. NIHIN
Pembina Utama Madya
NIP. 010 049 641**

**LEMBARAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2001 NOMOR 54 SERI E**

BAB I PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah merupakan bagian dari pembangunan nasional yang dilaksanakan secara berkelanjutan. Oleh karena itu dalam pelaksanaan pembangunan harus sejalan dan menunjang keberhasilan terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Selain itu pembangunan daerah Propinsi Kalimantan Tengah harus mampu menampung dan mewujudkan aspirasi masyarakat daerah dan aktivitas pembangunan di daerah Kabupaten/Kota dalam lingkup Wilayah Propinsi Kalimantan Tengah.

Pembangunan yang dilaksanakan dewasa ini, menggunakan pendekatan yang berbeda dengan pembangunan sebelumnya, terutama dimasa orde baru. Pembangunan dimasa orde baru lebih menggunakan pendekatan sentralistik, sedangkan dewasa ini mengutamakan pendekatan desentralisasi, sejalan dengan tuntutan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 22 tahun 1999 dan Undang-undang nomor 25 tahun 1999. Berdasarkan pada pendekatan ini, dituntut partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat dan jajaran pemerintahan, untuk secara bertanggung jawab menentukan berbagai kebijakan dan program pembangunan daerah sesuai dengan aspirasi masyarakat maupun kebutuhan daerah.

Pembangunan pada hakekatnya merupakan upaya secara terus menerus, bertahap dan sistimatis untuk mewujudkan kehendak masyarakat (rakyat) maupun upaya memecahkan

berbagai permasalahan aktual yang dihadapi. Dalam jangka panjang pembangunan nasional maupun daerah diarahkan untuk mewujudkan kemakmuran, keadilan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Dalam jangka pendek yang menjadi prioritas perhatian pelaksanaan pembangunan nasional maupun daerah diarahkan pada upaya mengatasi krisis yang bersifat multidimensi, mengembangkan demokratisasi, menghormati hak asasi manusia dan menegakkan supremasi hukum. Sementara itu untuk daerah Propinsi Kalimantan Tengah lebih diarahkan pada upaya mengentaskan kemiskinan melalui peningkatan pendapatan, perluasan kesempatan kerja, memperkokoh ekonomi kerakyatan, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan investasi, membuka keterisolasian antar daerah, mengembangkan wilayah pemerintahan, membangun infrastruktur, memelihara kelestarian lingkungan, meningkatkan pendapatan asli daerah dan meningkatkan pelayanan sosial kemasyarakatan.

Dalam rangka mewujudkan tujuan sebagaimana diuraikan di atas Propinsi Kalimantan Tengah memiliki berbagai potensi sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia serta keragaman budaya dan adat istiadat yang kesemua ini dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin dalam proses pelaksanaan pembangunan daerah Propinsi Kalimantan Tengah. Patut dipertimbangkan dalam merumuskan perencanaan pembangunan daerah Propinsi Kalimantan Tengah, baik yang menyangkut perumusan visi, misi, penetapan strategi maupun kebijakan serta penentuan program pembangunan, hendaknya harus sejalan dengan keinginan dan kebutuhan berbagai dimensi kehidupan masyarakat Kalimantan Tengah sebagaimana tercermin dalam filosofis hidup "Huma Betang" masyarakat Kalimantan Tengah. Makna dari filosofis hidup "Huma Betang" menggambarkan keinginan masyarakat

Kalimantan Tengah hidup makmur dan sejahtera dalam suasana kebersamaan, kesetaraan, keterbukaan, keharmonisan, keserasian, keakraban, kejujuran dan kedamaian yang berlandaskan pada akar budaya adat istiadat masyarakat Kalimantan Tengah.

Penyusunan Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah, merupakan upaya dan rangkaian proses perencanaan pembangunan daerah untuk dijadikan pegangan atau pedoman terutama bagi pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha dalam mendayagunakan potensi sumberdaya yang ada guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional maupun pembangunan daerah yang sesuai dengan kehendak rakyat di daerah Propinsi Kalimantan Tengah.

B. Pengertian

Pola Dasar Pembangunan Propinsi Kalimantan Tengah adalah kerangka umum Perencanaan Pembangunan di Propinsi Kalimantan Tengah sebagai pernyataan kehendak masyarakat yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Kalimantan Tengah bersama Gubernur Kalimantan Tengah.

C. Maksud dan Tujuan

Pola Dasar Pembangunan Propinsi Kalimantan Tengah ditetapkan dengan maksud memberi arah bagi penyelenggaraan pembangunan di Propinsi Kalimantan Tengah dengan tujuan mewujudkan kehidupan yang demokratis, berkeadilan sosial, maju, mandiri, menghargai supremasi

hukum dan hak azasi manusia dalam tatanan masyarakat dan lingkungan yang beradab, kualitas dan sejahtera dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

D. Landasan

Pola Dasar Pembangunan Propinsi Kalimantan Tengah ini disusun atas dasar landasan idiil Pancasila, landasan konstitusional Undang-Undang Dasar 1945, landasan operasional Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999.

E . Sistematika

- Bab I PENDAHULUAN
- Bab II KONDISI DAN POTENSI DAERAH
- Bab III VISI, MISI DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH
- Bab IV ARAH KEBIJAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
- Bab V KAIDAH PELAKSANAAN
- Bab VI PENUTUP

BAB II KONDISI DAN POTENSI DAERAH

A. KONDISI UMUM

1. Propinsi Kalimantan Tengah dengan luas wilayah 153.564 Km² terletak di daerah Khatulistiwa, yaitu antara 0°45" LU dan 3°30" LS dan 111°BT dan 116°BT memiliki iklim tropis yang lembab dan panas dengan suhu udara berkisar antara 21 - 33° C dengan curah hujan terbesar sepanjang tahun. Dalam keadaan normal musim hujan terjadi pada bulan Oktober sampai dengan Desember dan Januari sampai dengan Maret, sedangkan musim kemarau terjadi antara bulan Juni sampai dengan Agustus. Sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah masih berupa hutan belantara 126.200 Km², rawa 18,115 Km², sungai, danau dan genangan 4.563 Km², tanah lainnya 4.686 Km². Daerah pantai dan rawa terdapat di bagian selatan dengan ketinggian 0- 50 m dari permukaan laut dengan kemiringan 0-8%. Daerah perbukitan terdapat di bagian tengah dengan ketinggian 50 – 100 m dan kemiringan rata-rata 25%. Sedangkan pegunungan terdapat pada bagian Utara dan Barat Daya. Sebelah Timur berbatasan dengan Propinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan, sebelah Barat berbatasan dengan Propinsi Kalimantan Barat, sedangkan sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa. Secara administrasi Propinsi Kalimantan Tengah terdiri atas lima Kabupaten dan satu Kota, dan tujuh Wilayah Pembantu Bupati, dengan kota Palangka Raya berfungsi sebagai Ibukota Propinsi.

2. Kedudukan Geografis Propinsi Kalimantan Tengah berada pada posisi yang sangat strategis, karena berhadapan langsung dengan pulau Jawa dan berada di tengah Propinsi lainnya (Kalsel, Kaltim, Kalbar) di Pulau Kalimantan. Posisi yang demikian itu sangat menguntungkan bila dilihat dari kepentingan : Pengembangan kegiatan ekonomi daerah dalam hal ini sebagai sumber bahan baku untuk kegiatan industri maupun perdagangan yang berada di pulau Jawa; mempermudah terwujudnya kesatuan ekonomi wilayah; mempermudah interaksi sosial budaya guna terwujudnya persatuan nasional; mempunyai peluang didalam memanfaatkan kemajuan dan pertumbuhan ekonomi baik yang ada di Jawa maupun yang ada di Propinsi dalam lingkup wilayah Kalimantan; mempermudah hubungan ekonomi antar wilayah, terutama yang berkaitan dengan perluasan pasar, pemenuhan kebutuhan tenaga kerja, penyerapan informasi dan teknologi.

B. KONDISI BIDANG PEMBANGUNAN DAERAH

1. Ekonomi

Kemajuan Ekonomi Kalimantan Tengah yang tercermin dalam pertumbuhan ekonomi selama Pelita enam mencapai angka rata - rata 5,02% per tahun. Dan pada akhir Pelita VI mengalami penurunan dan diperkirakan pada tahun 2000 - 2004 angka pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah mencapai rata-rata 2,41% per tahun. Penurunan tersebut akibat terjadinya krisis ekonomi termasuk didalamnya krisis moneter, menimbulkan krisis berkepanjangan yang bersifat multidimensional pada

tataran nasional dan regional. Implikasi dari krisis dimaksud secara nyata telah memperbesar jumlah masyarakat miskin, jumlah penganggur dan penurunan pendapatan masyarakat.

2. Kesejahteraan Rakyat, Pendidikan dan Kebudayaan

Pembangunan di sektor pendidikan sebagai upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia terutama yang berkaitan dengan pendidikan ketrampilan dan penguasaan Iptek perlu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh. Pengembangan sumberdaya manusia hendaknya diarahkan pada peningkatan produktivitas dan ketrampilan kerja serta kemampuan daya saing dalam menghadapi berbagai kompetisi baik pada tingkat regional, nasional maupun internasional untuk mengisi ataupun merebut kesempatan kerja di pasar tenaga kerja.

Ilmu pengetahuan dan teknologi secara tradisional sudah dimiliki, diketahui dan dimanfaatkan oleh masyarakat dalam berbagai kegiatan, seperti; pertanian, perikanan, perkebunan, kehutanan, dan lain-lain. Teknologi yang digunakan relatif sederhana sesuai dengan keadaan alam dan lingkungan, sehingga pengaruhnya terhadap perbaikan ekonomi masyarakat relatif terbatas. Pemanfaatan teknologi yang bersifat modern dan tepat guna, belum banyak diserap dan diketahui oleh masyarakat, karena kurangnya informasi dan sosialisasi yang diberikan, baik melalui jalur pendidikan maupun pelatihan.

Disamping itu pendayagunaan teknologi modern dan tepat guna, membutuhkan biaya yang relatif mahal dan tidak terjangkau pembeliannya oleh masyarakat dan untuk itu

perlu bantuan. Dalam hal penggunaan teknologi perlu dipertimbangkan, selain mementingkan segi produktivitas dan efisiensi, juga memperhatikan kesesuaian, keserasian, keselarasan dengan aspek lingkungan dan budaya masyarakat setempat.

Pembangunan di sektor kesehatan yakni penyediaan tenaga medis (dokter, perawat dan bidan) telah diprogramkan dan disebarkan ke berbagai daerah Kabupaten/Kota maupun pedesaan. Begitu pula pembangunan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, klinik bersalin, posyandu, pelayanan KB, penyediaan apotik, laboratorium, fasilitas operasi serta fasilitas kesehatan lainnya telah disediakan dan masih perlu ditingkatkan baik yang menyangkut kelengkapannya, kualitas pelayanan dan jumlah serta kualitasnya dimasa depan masih perlu diprogramkan. Masalah yang masih dirasakan di sektor kesehatan adalah tenaga medis yang masih terbatas, distribusi obat ke berbagai daerah masih mengalami kesulitan, pelengkapan rumah sakit, puskesmas, klinik bersalin, obat-obatan masih belum memadai dan belum mencukupi kebutuhan masyarakat. Begitu juga pola pelayanan kesehatan dirasakan masih kurang memuaskan terutama pada rumah sakit maupun puskesmas milik pemerintah. Disamping itu biaya berobat (harga obat) adakalanya dirasakan sangat mahal terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah.

3. Agama

Partisipasi masyarakat dalam membangun fasilitas ibadah cukup tinggi, sebagai upaya untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Hubungan antar pemeluk agama berjalan baik, yang ditandai belum pernah terjadinya konflik didalam masyarakat yang bersumber dari masalah SARA.

4. Hukum

Dibidang Politik dengan munculnya berbagai organisasi partai politik, menciptakan peluang untuk tumbuhnya kehidupan dan kesadaran berdemokrasi dilingkungan masyarakat Kalimantan Tengah.

Tata kehidupan masyarakat Kalimantan Tengah selain diatur oleh hukum positif juga banyak diatur melalui hukum adat yang umumnya sangat dipatuhi dan dihormati oleh masyarakat Kalimantan Tengah.

C. POTENSI DAERAH

1. Sumber Daya Manusia

Penduduk Kalimantan Tengah berdasarkan data terakhir berjumlah 1.719.241 jiwa, laju pertumbuhan rata-rata 2,56% per tahun dengan tingkat kepadatan untuk masing-masing daerah Kabupaten/Kota berkisar antara 5,30 orang/Km² - 57,41 orang/Km². Pola pemukiman penduduk tersebar dan terkonsentrasi di sepanjang daerah pinggiran sungai-sungai besar. Kalimantan Tengah dihuni oleh Penduduk Asli Suku Dayak disamping suku-suku lainnya yang telah berintegrasi kedalam Masyarakat Kalimantan Tengah. Keseluruhan suku Dayak tersebut memiliki adat

istiadat dan budaya yang relatif berbeda, disamping memiliki berbagai kesamaan. Permasalahan yang dihadapi dalam kependudukan Kalimantan Tengah diantaranya ialah: Struktur penduduk sebagian besar berusia muda dan belum produktif, mobilitas penduduk masih rendah dan masalah registrasi penduduk baik yang berkaitan dengan angka kelahiran, kematian, migrasi belum berjalan sebagaimana mestinya. Keadaan demikian tentunya menyulitkan baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan pembangunan.

2. Sumber Daya Alam

Sumberdaya alam yang dimiliki Kalimantan Tengah cukup beragam dan potensial dalam menenuhi berbagai kepentingan pembangunan dan kebutuhan masyarakat. Seperti sungai, danau, rawa dan lahan masih terbuka luas baik untuk kepentingan pertanian maupun perkebunan. Selain itu sumberdaya hutan diantaranya : Kayu, jelutung, tengkawang, kulit gemor, damar dan lain-lain masih potensial untuk dieksploitasi sebagai sumber mata pencaharian masyarakat. Hasil perkebunan rakyat diantaranya : Karet, rotan, lada, kopi dan jenis tanaman hortikultura lainnya cukup tersedia dan memadai untuk dikembangkan sebagai komoditi komersial. Hasil pertambangan : berupa emas, pasir kuarsa, batu bara dan berbagai jenis batuan berharga lainnya juga tersedia dan terbuka untuk dieksploitasi sebagai sumber penghasilan maupun sumber pendapatan asli daerah. Selain itu beragam jenis satwa yang khas Kalimantan Tengah, merupakan kekayaan ekosistem yang perlu dilestarikan untuk pembangunan masa kini maupun masa depan.

3. Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan yang ada dan yang telah dibangun diantaranya ialah : Jalan, jembatan, pelabuhan, fasilitas kelistrikan, fasilitas air bersih, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas keagamaan, fasilitas transportasi dan telekomunikasi, walaupun masih perlu ditingkatkan baik dalam arti kuantitas maupun kualitasnya, guna memenuhi kebutuhan ataupun kepentingan masyarakat maupun dalam mengembangkan perekonomian daerah.

4. Pariwisata

Propinsi Kalimantan Tengah memiliki obyek wisata secara alami cukup lengkap diantaranya wisata budaya, wisata alam, wisata sejarah dan umumnya tersebar di beberapa daerah Kabupaten/Kota dalam lingkup wilayah Propinsi Kalimantan Tengah. Obyek wisata tersebut kondisinya belum banyak dimanfaatkan secara komersial dan optimal, sebagai sumber pendapatan daerah maupun sebagai sumber mata pencaharian masyarakat. Prasarana dan sarana kepariwisataan daerah ini disamping belum memadai kelengkapannya, juga profesionalisme dalam pengelolaannya belum sebagaimana diharapkan. Dimasa datang keadaan ini perlu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh baik oleh pemerintah, dunia swasta dan masyarakat agar dapat memberikan manfaat yang maksimal untuk pengembangan perekonomian daerah, perluasan kesempatan kerja serta penciptaan pendapatan masyarakat Kalimantan Tengah.

BAB III

VISI, MISI DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH

A. Visi

Terwujudnya kehidupan masyarakat Kalimantan Tengah yang maju, sejahtera, mandiri dan bermartabat dalam lingkungan yang lestari diikuti suasana kehidupan yang semakin demokratis, damai dan berkeadilan serta pemerintahan yang bersih, profesional dan berwibawa sejalan dengan falsafah hidup "Huma Betang" dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia.

B. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan daerah maka dirumuskan misi pembangunan Propinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut :

1. Meningkatkan sumber daya manusia yang semakin berkualitas, berdaya tahan, berwawasan luas, terampil, produktif, bermental baik, berbudi pekerti luhur, berlandaskan kepada keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
2. Memberdayakan dan memperkuat seluruh kekuatan ekonomi daerah dan ekonomi kerakyatan terutama dikalangan pengusaha kecil, menengah dan koperasi dengan mendayagunakan secara efisien dan efektif potensi sumber daya yang dimiliki daerah Propinsi Kalimantan Tengah, untuk kemanfaatan pengembangan perekonomian daerah, peningkatan pendapatan masyarakat, kemajuan dunia usaha dan kecukupan sandang, pangan dan papan.

3. Meningkatkan dan memantapkan kehidupan sosial budaya, guna membentuk jati diri masyarakat Kalimantan Tengah yang utuh dan tangguh berlandaskan pada kepribadian, etika moral, sikap kritis dan dinamis sehingga memiliki daya tahan terhadap pengaruh negatif dari arus globalisasi yang menyentuh keseluruhan dimensi kehidupan masyarakat.
4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar dalam rangka memajukan kesejahteraan, memperluas pelayanan sosial kemasyarakatan, mempercepat pembangunan ekonomi daerah mempertinggi pertumbuhan ekonomi, mendorong kegiatan investasi, memperlancar perdagangan antar daerah, meningkatkan pendapatan asli daerah, mempertinggi mobilitas dan interaksi sosial ekonomi antar daerah, dan mempercepat pengembangan wilayah, baik pemekaran wilayah pemerintahan, pengembangan pusat pertumbuhan, pemantapan sentra produksi maupun sentra industri.
5. Meningkatkan pendayagunaan ataupun pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan lestari untuk digunakan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan ekonomi daerah, baik untuk kepentingan kelangsungan hidup generasi kini maupun generasi mendatang.

C. Strategi

Untuk mencapai visi dan misi Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Tahun 2001 – 2005 harus disesuaikan dengan kondisi dan potensi Daerah Propinsi Kalimantan Tengah serta mampu memanfaatkan peluang dan mengatasi kendala yang dihadapi.

BAB IV

ARAH KEBIJAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Berdasarkan perumusan dan penetapan visi, misi dan strategi, maka arah kebijaksanaan pembangunan daerah Propinsi Kalimantan Tengah ditekankan pada sembilan bidang pembangunan yakni :

A. HUKUM

Dalam rangka menegakkan supremasi hukum dalam suatu negara hukum maka arah kebijaksanaan pembangunan hukum di Propinsi Kalimantan Tengah adalah :

1. Membangun budaya hukum masyarakat berdasarkan pada peningkatan kesadaran hukum, kepastian hukum, keadilan, kedisiplinan, kebenaran dan konsistensi pelaksanaan hukum.
2. Meningkatkan profesionalisme aparat penegak hukum untuk melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, mandiri, jujur, adil dan independen dan menghormati HAM.
3. Mendorong terselenggaranya proses peradilan secara cepat, mudah, murah, terbuka dan bebas KKN.
4. Mementingkan peraturan perundang-undangan dan peraturan Daerah yang mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah, mengakomodir ekonomi dan kebutuhan masyarakat dan membantu kelancaran hubungan antar daerah.

5. Meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana bagi penegakan Peraturan daerah guna mewujudkan pelaksanaan Peraturan Daerah yang efektif, tertib dan produktif.
6. Menghimpun dan mengkodifikasikan Hukum Adat yang terdapat dan berlaku dilingkungan masyarakat Dayak Kalimantan Tengah sehingga pengembangan dan pembinaan Hukum Adat dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

B. EKONOMI

Dalam rangka memantapkan dan memperkuat perekonomian daerah yang turut terimbas krisis ekonomi dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi daerah dalam menghadapi era pasar bebas maka arah kebijaksanaan ekonomi sebagai berikut :

1. Mengembangkan perekonomian yang bertumpu pada sistem ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada pasar global dan mekanisme pasar dengan prinsip persaingan yang sehat dan memperhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai keadilan, kepentingan sosial, kualitas hidup, pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sehingga terjamin kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja, perlindungan hak-hak konsumen serta perlakuan yang adil bagi seluruh masyarakat..
2. Mengoptimalkan peranan pemerintah daerah dalam rangka memperlancar mekanisme pasar secara efektif dan efisien.

3. Mengembangkan dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber potensi obyektif daerah yang didukung oleh kemajuan IPTEK dan SDM dengan membangun keunggulan kompetitif berdasarkan keunggulan komparatif sebagai wilayah agraris dan maritim sesuai kompetensi dan produk unggulan dari hasil – hasil daerah seperti pertanian dalam arti luas, kehutanan, kelautan, pertambangan, industri kecil dan kerajinan rakyat, dengan arah pengembangan kepariwisataan.
4. Memacu dan menumbuhkan sektor industri khususnya industri – industri unggulan daerah dalam rangka meningkatkan ekspor non migas dengan memperlancar perizinan yang transparan, mudah, murah dan cepat serta penciptaan iklim investasi yang aman dan sehat.
5. Menata dan mengoptimalkan kinerja badan usaha milik daerah secara efisien, transparan dan profesional.
6. Mengembangkan hubungan kemitraan dalam bentuk keterkaitan usaha yang saling menunjang dan menguntungkan antara koperasi swasta dan BUMD serta usaha besar, menengah dan kecil dalam memperkuat struktur ekonomi daerah.
7. Mendorong kerjasama ekonomi daerah regional, nasional dan internasional yang saling menguntungkan, tanpa mengorbankan kepentingan daerah.
8. Memperhatikan azas berkelanjutan (sustainability) termasuk memelihara kesejahteraan, keselarasan dan kelestarian lingkungan.

9. Mengembangkan kebijakan pertanahan untuk meningkatkan pemanfaatan dan penggunaan tanah secara adil, transparan dan produktif dengan mengutamakan hak-hak rakyat setempat, termasuk hak ulayat dan masyarakat adat berdasarkan tata ruang wilayah yang serasi dan seimbang.
10. Peningkatan Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi baik transportasi, telekomunikasi, energi, listrik, irigasi dan air bersih.
11. Memperluas lapangan pekerjaan diberbagai sektor secara menyeluruh dan terpadu yang diarahkan pada peningkatan kemampuan dan kemandirian dalam rangka mengurangi pengangguran akibat adanya krisis ekonomi.
12. Mempercepat pemulihan ekonomi guna membangkitkan sektor riil terutama pengusaha kecil, menengah dan koperasi.
13. Mengoptimalkan penerimaan pajak melalui upaya ekstensifikasi, intensifikasi dan diversifikasi pajak daerah dan lain-lain sumber pendapatan daerah dalam rangka peningkatan kemampuan Pembangunan di daerah yang semakin mantap dan mandiri sesuai jiwa dan semangat Otonomi Daerah.

C. PEMBANGUNAN POLITIK

1. Politik

- a. Memperkuat dan mempertahankan keberadaan Propinsi Kalimantan Tengah sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertumpu pada Bhineka Tunggal Ika.
- b. Meningkatkan peran Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan menegaskan fungsi, wewenang dan tanggungjawabnya.
- c. Mengembangkan sistem politik yang berkedaulatan rakyat, demokratis, terbuka dan kehidupan kepartaian yang menghormati keberagaman aspirasi politik.
- d. Meningkatkan kemandirian partai politik terutama dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat.
- e. Meningkatkan pendidikan politik secara intensif dan komprehensif kepada masyarakat untuk mengembangkan budaya politik dan demokratis, menjunjung tinggi supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia.
- f. Memasyarakatkan dan menerapkan prinsip persamaan dan anti diskriminasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

- g. Membangun daerah Kalimantan Tengah menuju masyarakat yang maju, mandiri, bersatu, rukun, damai, demokratis, dinamis, toleran dan sejahtera.

2. Penyelenggaraan Pemerintahan

- a. Membersihkan penyelenggaraan pemerintahan dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme dengan memberikan sanksi yang seberat-beratnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan meningkatkan efektivitas pengawasan baik internal, fungsional dan masyarakat.
- b. Meningkatkan kualitas aparatur pemerintah dengan memperbaiki kesejahteraan dan profesionalisme serta memberlakukan sistem karier berdasarkan prestasi.
- c. Meningkatkan fungsi dan keprofesionalan birokrasi pemerintahan dalam melayani masyarakat dan akuntabilitasnya dalam mengelola kekayaan negara secara transparan, bersih dan bebas dari penyalahgunaan kekuasaan.
- d. Memantapkan netralitas politik pegawai negeri dengan menghargai hak-hak politiknya.
- e. Meningkatkan kualitas Aparatur pemerintah yang ada melalui jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

3. Komunikasi, Informasi dan Media Massa

- a. Meningkatkan pemanfaatan peran komunikasi baik melalui media massa, elektronik dan tradisional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, memperkuat persatuan dan kesatuan, serta membentuk kepribadian bangsa.
- b. Meningkatkan kualitas komunikasi di berbagai bidang melalui penguasaan dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi.
- c. Meningkatkan peran pers yang bebas sejalan dengan peningkatan kualitas dan profesional, berintegritas dan menjunjung tinggi etika pers, supremasi hukum serta Hak Azasi Manusia.

D. AGAMA

Dalam rangka peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Kalimantan Tengah maka arah kebijaksanaan yang perlu diambil adalah sebagai berikut :

1. Memantapkan fungsi, peran dan kedudukan agama sebagai landasan moral, spiritual dan etika dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat.
2. Meningkatkan kualitas pendidikan agama serta pembangunan sarana dan prasarana tempat beribadah serta sarana pendukung yang memadai.

3. Meningkatkan dan memantapkan kerukunan hidup antar umat beragama sehingga tercipta kehidupan yang harmonis dan saling menghormati.
4. Meningkatkan kemudahan umat beragama dalam menjalankan ibadahnya, termasuk penyempurnaan kualitas pelayanan ibadah haji dan peranan zakat bagi kepentingan umatnya.
5. Meningkatkan peran dan fungsi lembaga-lembaga keagamaan dalam proses pembangunan.

E. PENDIDIKAN

1. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, yang tinggi, serta peningkatan anggaran pendidikan.
2. Meningkatkan kemampuan akademik dan profesional kepada tenaga kependidikan serta kesejahteraannya.
3. Meningkatkan kelangsungan proses belajar mengajar pada seluruh jenjang pendidikan melalui penyediaan bantuan biaya pendidikan bagi yang berprestasi dan mengalami hambatan pendanaan.
4. Peningkatan operasional pendidikan, pencegahan anak putus sekolah, mendukung upaya pendidikan luar sekolah, penyiapan tenaga terampil pendidikan serta kegiatan bidang pemuda dan olah raga.

F. KETENAGAKERJAAN (S.D.M)

1. Meningkatkan kesempatan kerja disegala sektor daerah
2. Meningkatkan keterampilan dan kualitas angkatan kerja yang produktif di daerah, melalui berbagai pelatihan
3. Meningkatkan pengawasan dan perlindungan kerja dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
4. Meningkatkan pembinaan dan perlindungan, demi terciptanya ketenagakerjaan dengan program jaminan sosial (Astek).
5. Meningkatkan pengawasan terhadap wajib lapor lowongan kerja untuk mengurangi jumlah pengangguran yang semakin meningkat.

G. SOSIAL DAN BUDAYA

1. Kesehatan

- a. Meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan kepada masyarakat baik penyediaan dan distribusi obat dengan biaya yang terjangkau dan cepat.
- b. Meningkatkan dan memelihara mutu lembaga dan pelayanan kesehatan melalui pemberdayaan sumber daya manusia secara berkelanjutan dan sarana prasarana dalam bidang medis.

- c. Meningkatkan kualitas penduduk melalui pengendalian kelahiran, memperkecil angka kematian dan peningkatan kualitas program keluarga berencana.
- d. Memberantas secara sistematis perdagangan dan penyalahgunaan narkotik dan obat-obat terlarang dengan memberikan sanksi yang seberat-beratnya baik kepada produsen, pengedar dan pemakai.

2. Kesejahteraan Sosial

- a. Pembinaan dan pengembangan peran serta masyarakat, diarahkan untuk meningkatkan kepedulian dan kepekaan masyarakat dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial dan lingkungannya secara profesional dan melembaga.
- b. Pembinaan, pengembangan potensi dan kesejahteraan sosial, diarahkan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- c. Bantuan dan atau rehabilitasi sosial, diarahkan untuk mengembalikan dan meningkatkan kemampuan warga masyarakat baik perorangan, kelompok/keluarga agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- d. Perlindungan dan jaminan kesejahteraan sosial, diarahkan pada pemberian perlindungan pada anak, perempuan, lanjutan usia dari berbagai tindak kekerasan dan salah.

3. Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata

- a. Menggali, mengembangkan dan membina peninggalan sejarah dan kebudayaan daerah yang mengandung nilai-nilai universal.
- b. Menjadikan kesenian dan kebudayaan tradisional daerah sebagai wahana bagi pengembangan pariwisata dan secara kontinue dilakukan promosi baik ditingkat nasional maupun internasional.
- c. Mengembangkan pariwisata melalui pendekatan sistem yang utuh dan terpadu dengan memperhatikan nilai ekonomis, teknis, sosial budaya, hemat energi, melestarikan alam dan tidak merusak lingkungan.

4. Kedudukan dan Peranan Perempuan

- a. Membentuk lembaga untuk meningkatkan kualitas peran dan kemandirian organisasi perempuan yang ada di daerah dalam rangka melanjutkan usaha pemberdayaan perempuan, kesejahteraan keluarga dan masyarakat.
- b. Meningkatkan pembinaan peranan perempuan khususnya peran dan aktifnya dalam kegiatan pembangunan.
- c. Meningkatkan kualitas perempuan dalam bidang pendidikan baik formal dan non formal.

- d. Meningkatkan perlindungan dan penyuluhan hukum bagi kaum perempuan.

5. Pemuda dan Olah Raga

- a. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan generasi muda dalam tanggung jawab bersama antara orang tua, masyarakat dan pemerintah.
- b. Melindungi generasi muda, dari bahaya destruktif, terutama bahaya narkoba, obat terlarang dan zat aditif lainnya.
- c. Meningkatkan kegiatan mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olah raga.
- d. Meningkatkan kegiatan pembibitan dan pembinaan olah raga.

H. PEMBANGUNAN WILAYAH

1. Melaksanakan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab dalam rangka pemberdayaan masyarakat, lembaga politik, lembaga hukum, lembaga adat dan lembaga swadaya masyarakat serta seluruh potensi masyarakat.
2. Melakukan pengkajian tentang kesiapan pemekaran wilayah kabupaten dan kota.

3. Mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kuat dengan memperdayakan pelaku dan potensi ekonomi daerah dengan mengacu pada tata ruang wilayah.
4. Mempercepat pertumbuhan pedesaan khususnya daerah terpencil dalam rangka pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan sarana dan prasarana yang diperlukan.
5. Meningkatkan kualitas proses dan pelaksanaan Pembangunan Kependudukan dan Transmigrasi bertumpu pada kebutuhan Daerah.
6. Meningkatkan konsolidasi dan penataan penduduk pada desa-desa tertinggal melalui program Transmigrasi.
7. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Masyarakat Transmigrasi agar segera mandiri.
8. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan manajemen informasi kependudukan.

I. SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

1. Mengelola dan memelihara berbagai potensi sumber daya alam dan daya dukungannya agar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.
2. Pemulihan mutu dan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup sehingga berfungsi kembali baik dalam proses produksi maupun pelestarian lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.

3. Mendayagunakan sumber daya alam yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dengan memerhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, demi pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat lokal serta penataan ruang yang penguasaannya diatur dalam peraturan daerah.
4. Melaksanakan perencanaan, pemantauan, pengendalian dan rehabilitasi lingkungan hidup dalam rangka memperbaiki berfungsinya ekosistem yang berkaitan dengan aktivitas dunia usaha dalam mengeksploitasi sumber daya alam.

J. KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT

Dalam rangka meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat ditentukan oleh unsur aparat keamanan, aparat penegak hukum, partisipasi masyarakat dan sistem pengamanan yang dilakukan. Kesemua unsur tersebut perlu melakukan koordinasi dan kerjasama untuk mengembangkan sistem pembinaan ketertiban dan keamanan di dalam masyarakat. Guna kepentingan dimaksud diperlukan langkah-langkah berikut ini :

1. Mengembangkan kemampuan sistem pengamanan swakarsa yang bertumpu pada kekuatan rakyat sehingga tercipta ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah

2. Mengembangkan sikap mental masyarakat untuk berpartisipasi secara luas dengan penuh disiplin dan kesadaran di dalam memelihara ketertiban, ketentraman dan keamanan, baik pada lingkungan masyarakat, lingkungan kerja maupun usaha.
3. Mengupayakan program latihan bagi masyarakat untuk berkemampuan melakukan perlindungan terhadap dirinya sendiri dari gangguan keamanan dan ketertiban.

BAB V

KAIDAH PELAKSANAAN

Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk dilaksanakan oleh Pemeritah Daerah Propinsi Kalimantan Tengah, guna dijadikan sebagai pedoman dan memberi arah dalam penyelenggara pembangunan di Kalimantan Tengah. Adapun kaidah-kaidah dalam pelaksanaannya ditetapkan sebagai berikut :

1. Bahwa semua pelaksanaan pembangunan di Kalimantan Tengah baik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, dunia usaha maupun masyarakat harus mengacu pada Pola Dasar Pembangunan Propinsi Kalimantan Tengah.
2. Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah dalam pelaksanaannya dituangkan dalam Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) lima tahun yang memuat uraian kebijaksanaan secara rinci dan terukur yang ditetapkan dengan Perda.
3. Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) lima tahun dirinci dalam Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (REPETADA) sebagai dasar penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

BAB VI PENUTUP


Dalam rangka mencapai VISI, MISI DAN STRATEGI yang telah menjadi tekad dan sasaran pembangunan daerah Propinsi Kalimantan Tengah, maka perlu peran aktif masyarakat, sikap mental, tekad, semangat serta ketaatan dan disiplin para penyelenggara pemerintahan. Sehubungan dengan itu, maka semua kekuatan sosial politik, organisasi kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan lainnya perlu menyusun program menurut fungsi dan peranan masing-masing dalam melaksanakan pola dasar pembangunan Propinsi.

Penyusunan Pola Dasar Pembangunan Propinsi Tengah pada masa yang akan datang, perlu dikembangkan peran aktif dari masyarakat. Dengan demikian, seluruh masyarakat akan merasa memiliki Kalimantan Tengah dan hasil pembangunan yang dicapai dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat secara adil dan merata.

Keberhasilan Pembangunan Daerah di Kalimantan Tengah tidak akan lepas dari peran serta masyarakat, dunia usaha beserta unsur Pemerintah Daerah.

Disahkan di Palangka Raya
pada tanggal 2 Agustus 2001

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



ASMAWI AGANI

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
KALIMANTAN TENGAH,**



**Drs. A. DJ. NIHIN
Pembina Utama Madya
NIP. 010 049 641**

**LEMBARAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN
TENGAH
TAHUN 2001 NOMOR 54 SERI E**